



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN **2024**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
4.1 Program dan Kegiatan.....	49
BAB V PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 s/d Triwulan II Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang	9
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	21
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang	28
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022	43
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang	51

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana Program/Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran mengacu pada pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rencana Kerja Tahun 2024 juga menjabarkan tujuan dan sasaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Renja 2024 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP 2024-2026. Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pemungutan Liar
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tahun Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dimaksud;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2024 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 didasarkan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, untuk mengetahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL T-C.29
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2019 S/D TRIWULAN II TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE					URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) S.D TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2023			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
										TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI (2023)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2023 (%)	REALISASI KINERJA & ANGGARAN RKPD s/d TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)
1					2	3	4		5	6	7	8	9	10
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	01			Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Cakupan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		100	-	-	100	
2	18	01	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	13	Dokumen		4	-			

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang dihasilkan								
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		1	-			
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	2	1	-			
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		1	-			
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	2	1	-			
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dokumen		1	-			

						Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
2	18	01	2. 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	2	1	-			
2	18	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	8	Laporan	3	2	-			
2	18	01	2. 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108	Orang/B ulan	36	18	18			
2	18	01	2. 02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1	1	-			

2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	Laporan	2	1	-			
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1	Tahun	-	100	-			
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	-	2	-			
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100	Persen	-	20	-			
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	Paket	-	1	-			
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	20	Orang	-		-			

					Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	-		-			
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	36	Bulan	12	12	-			
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	105	Paket	51	14	-			
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	49	Paket	18	26	-			
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	21	12	-			
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	Laporan	3	4	-			

2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139	Laporan	68	22	-			
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	100	100	-			
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	-	1	-			
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	Unit	-		-			
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	Unit	14	4	-			
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-		-			

2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	1	5	-			
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Bulan	12	12	-			
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	687	Laporan	447	230	-			
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	24	12	3			
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Laporan	-	4	-			
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36	Laporan	0	12	-			

						Kantor yang Disediakan									
2	18	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	Persen	100	100	-				
2	18	01	2. 09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39	Unit	9	13	-				
2	18	01	2. 09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	6	11	-				
2	18	01	2. 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1	Unit	1	1	-				
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengembngan Iklim Penanaman Modal	100	Persen	100	100	-				
2	18	02	2. 01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Dokumen Peraturan yang	2	Dokume n	1	1	-				

					Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan								
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen	1	1	-			
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2	Kegiatan Usaha	-	2	-			
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Investasi Penanaman Modal	12	Dokumen	8	4	-			
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12	Dokumen	8	4	-			

2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Promosi Penanaman Modal	100	Persen	150	100	-			
2	18	03	2. 01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi yang Dilaksanakan	100	Persen	150	100	-			
2	18	03	2. 01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokume n	2	1	-			
2	18	03	2. 01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	Dokume n	-	2	-			
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	92	Persen	80	92	-			
2	18	04	2. 01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Izin yang diterbitkan	16.000	Izin	5.591	5.000	-			

					Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
2	18	04	2. 01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	16.000	Pelaku Usaha	5.591	5.000	-			
2	18	04	2. 01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	630	Kegiatan Usaha	196	230	-			
2	18	04	2. 01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Tatakelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap	70	Orang	243	20	-			

						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan								
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	90	Persen	90	90	-			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang Ditinjau Penggunaan Perizinannya	150	Investor	170	55	-			
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	522	Kegiatan Usaha	70	240	-			
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	806	Pelaku Usaha	240	260	-			

2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	700	Kegiatan Usaha	102	110	-			
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100	Persen	100	100	-			
2	18	06	2.01	-	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan	12	Laporan	8	4	-			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Laporan	8	4	-			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi yang menangani masalah Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (PMDN/PMA) yang mengaju pada Rencana Strategis (Renstra) 2018-2022. Indikator kinerja utama menjadi ukuran instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun Indikator Kinerja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

a. Nilai Investasi PMDN dan PMA

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Berdasarkan jenisnya nvestasi diabgi menjadi dua jenis, yaitu investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Nilai Investasi	156.977.306.000	90.114.003.280	205.118.999.753	323.553.964.518	490.256.390.480

b. Jumlah Investor PMDN dan PMA

Jumlah Investor Penanaman Modal terdiri atas PMDN dan PMA. Jumlah PMDN terbagi atas Skala Mikro, Skala Kecil, Skala Menengah dan Besar. Jumlah Invsetor dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Investor	227	219	272	989	919

c. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pada Unit Pelayanan Perizinan. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 sebesar 84,14 berada pada kategori baik (pada interval 76,61-88,30%).

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian				Proyeksi	
				2021-2024	2018	2019	2020	2021	2022	2024
1	Nilai Investasi PMDN dan PMA			Rp 471.581.918.0 00	156.977.30 6.000	90.114.003. 280	205.118.9 99.753	323.553.96 4.518	157.227.3 06.000	157.227.3 06.000
2	Jumlah investor PMDN dan PMA Tahun Berjalan			810	227	219	272	989	270	280
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			90			82,06	84,14	87	90

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan dengan tugas dan fungsi adalah :

- a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Renja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Dalam penyusunan Renja ini perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*Strengths and Weaknesses*) dan kondisi eksternal (*Oppurtunities and Threats*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/pemohon izin.

1.2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan perizinan belum optimal dan belum memadai;
- b. Koordinasi dengan investor belum optimal;
- c. Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal dan perizinan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

1.1 Kesempatan (Opportunities)

- a. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali
- b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan/usaha masyarakat
- c. Dukungan dari visi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis modern

1.2 Ancaman (Threats)

- a. Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
- b. Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
- c. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan

- d. Persaingan investasi dengan Kabupaten lain semakin ketat

Dengan mempergunakan analisis SWOT, maka strategi yang dapat dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan dengan melakukan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan promosi

Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.

- 2) Penyempurnaan regulasi

Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

- 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi berbasis IT

Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

- 4) Peningkatan SDM pelayanan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal;

- 5) Peningkatan sarana prasarana

Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.

6) Peningkatan kapasitas kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya stabilitas keamanan yang kondusif untuk meningkatkan minat investor dan pengusaha
- c. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait
- d. Adanya dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan investasi.

4. Isu – isu Strategis

Terdapat isu-isu penting yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Citra pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan;
- b. Masih minimnya sosialisasi dan informasi pelayanan perizinan;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;

- e. Anggapan bahwa pengurusan izin hanya untuk masyarakat yang ada di perkotaan;
- f. Masyarakat yang tersebar jauh dari pusat pelayanan perizinan.

Dalam Pelayanan Perizinan, ada dua paradigma utama yang perlu dilakukan, yaitu :

- a. Reformasi regulasi perizinan, saat ini perizinan usaha sangat banyak dan tumpang tindih.
- b. Reformasi birokrasi perizinan, saat ini persyaratan pengurusan perizinan sangat banyak, tumpang tindih dan menyangkut banyak instansi teknis sehingga prosedur pelayanan tidak efisien.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk :

- a. Pemangkasan tahapan dan prosedur, baik lintas instansi maupun dalam instansi.
- b. Pemangkasan biaya, hal ini dapat dilakukan apabila prosedur juga dipangkas.
- c. Pengurangan jumlah persyaratan, jumlah persyaratan dapat dikurangi dan satu jenis persyaratan sudah dapat digunakan untuk berbagai izin yang diperlukan.
- d. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan
- e. Pengurangan waktu pemrosesan, dengan sistem dan prosedur yang disederhanakan sehingga pemangkasan waktu pemrosesan mendapat pertimbangan utama.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : **“Terwujudnya Layanan Perizinan yang Berkualitas serta Iklim Ivestasi yang Kondusif untuk Mendorong Ekonomi Menuju Daerah Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing “**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan
2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Investasi

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi pelayanan perizinan secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga perlu diperlukan perbaikan-perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, maka ada beberapa perbaikan anggaran pada beberapa kegiatan dan penambahan kegiatan yang baru.

Untuk lebih jelas, kami sajikan review rancangan awal sebelum dan setelah dilakukan perbaikan dalam table berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOD E	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuh an Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.810.493 .205	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	0	-	-	2.810.493 .205
2.18. 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100	%	57.000.00 0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100	%	57.000.00 0
2.18. 02.2. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Perda yang Diterbitkan	1	Doku men	54.000.00 0	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Perda yang Diterbitkan	1	Doku men	54.000.00 0

2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	51.500.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	51.500.000
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resikol	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1	Dokumen	2.500.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resikol	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1	Dokumen	2.500.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	12	Dokumen	3.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	12	Dokumen	3.000.000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12	Dokumen	3.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12	Dokumen	3.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100	%	17.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100	%	17.000.000

								Pulu, Batu Lappa				
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Promosi yang Dilaksanakan	100	%	17.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Promosi yang Dilaksanakan	100	%	17.000.000
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	17.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	17.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	80	%	202.500.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	80	%	202.500.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Izin Yang Terbit Dengan Tepat Wktu Sesuai Dengan SOP	5.100	Izin	202.500.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Izin Yang Terbit Dengan Tepat Wktu Sesuai Dengan SOP	5.100	Izin	202.500.000

							Daerah Kabupaten/ Kota					
2.18. 04.2. 01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.100	Pelaku Usaha	193.500.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.100	Pelaku Usaha	193.500.000
2.18. 04.2. 01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200	Kegiatan Usaha	5.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200	Kegiatan Usaha	5.000.000
2.18. 04.2. 01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Tatakelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	27	Orang	4.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Tatakelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	27	Orang	4.000.000

2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	90	%	417.400.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	90	%	417.400.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Investor yang Ditinjau Penggunaan Perizinannya	50	Investor	417.400.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Investor yang Ditinjau Penggunaan Perizinannya	50	Investor	417.400.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	230	Pelaku Usaha	318.565.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	230	Pelaku Usaha	318.565.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	300	Kegiatan Usaha	98.835.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	300	Kegiatan Usaha	98.835.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100	%	5.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100	%	5.000.000

2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan	4	Laporan	5.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan	4	Laporan	5.000.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	Laporan	5.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	Laporan	5.000.000
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.111.593.205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.111.593.205
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	1	Dokumen	6.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	1	Dokumen	6.500.000

..01.2 .01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Lapor an	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Lapor an	1.000.000
..01.2 .01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Doku men	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Doku men	4.500.000
..01.2 .01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lapor an	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lapor an	1.000.000
..01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1	Lapor an	1.715.349 .205	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1	Lapor an	1.715.349 .205
..01.2 .02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Oran g/Bula n	1.713.960 .205	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Oran g/Bula n	1.713.960 .205

..01.2 .02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lapor an	1.389.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lapor an	1.389.000
..01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12	Bulan	179.547.0 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12	Bulan	179.547.0 00
..01.2 .06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29	Paket	700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29	Paket	700.000
..01.2 .06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan		Paket	1.347.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	-	Paket	1.347.000
..01.2 .06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	2.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	2.500.000

..01.2 .06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	5.000.000
..01.2 .06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	170.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	170.000.000
..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	168.774.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	168.774.800
..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	217	Laporan	1.323.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	217	Laporan	1.323.000
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	48.207.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	48.207.900

..01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	9.201.100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Laporan	9.201.100
..01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	110.042.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	110.042.800
..01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	%	47.698.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	%	47.698.000
..01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	13	Unit	47.698.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	13	Unit	47.698.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan peningkatan kualitas aparaturnya melalui:

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
2. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah;
4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomiannya;

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Usulan Program dan kegiatan Masyarakat, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memiliki usulan dari Masyarakat/Pemangku Kepentingan melalui pelaksanaan Musrenbang maupun Reses DPRD.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel T-C.32.

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada perangkat daerah. Kebijakan dan prioritas pembangunan dan program prioritas dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebanyak 5 prioritas pembangunan yaitu;

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Sedangkan Pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang disertai dengan perbaikan tata kelola

pemerintahan pada semua unsur pembangunan, mewujudkan pengawasan internal pemerintahan yang semakin berkualitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di semua unit pelayanan yang berbasis pada teknologi informasi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan meningkatkan kinerja *e-government*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024 sesuai Renstra perangkat daerah adalah :

3.2.1 Tujuan :

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui kegiatan tahunan. Rencana strategis memuat target indikator kinerja tingkat sasaran strategis untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran. Tujuan Renja 2024 sebagaimana tercantum dalam Renstra 2018-2022 adalah Mendorong Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

3.2.2 Sasaran :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi;

- b. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja (Renja) dan Pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan usulan program/ kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut:

4.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1.1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Modalogram Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - 2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 3.1 Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

5.1 Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non
Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

6.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mendorong Peningkatan Investasi Daerah									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.111.593.205,00	APBD		100%	1.945.859.137,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	100%	6.500.000,00	APBD		100%	2.020.000,00

2.18.01. 2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	1 Dokumen	1.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.010.000,0 0
2.18.01. 2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	1 Dokumen	4.500.000,00	APBD		-	0
2.18.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1.000.000,00	APBD		1 Laporan	1.010.000,0 0
2.18.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.715.349.20 5,00	APBD		100%	1.732.502.6 97,00
2.18.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	19 Orang/bu lan	1.713.960.20 5,00	APBD		19 Orang/bula n	1.731.099.8 07,00

2.18.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	1 Laporan	1.389.000,00	APBD		1 Laporan	1.402.890,0 0
2.18.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum		12 Bulan	179.547.000, 00	APBD		12 Bulan	22.187.470, 00
2.18.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	37 Paket	700.000,00	APBD		37 Paket	707.000,00
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					APBD			
2.18.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	26 Paket	1.347.000,00	APBD		26 Paket	1.360.470,0 0
2.18.01. 2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	12 Paket	2.500.000,00	APBD		-	0
2.18.01. 2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	5 Laporan	5.000.000,00	APBD		-	0

2.18.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	25 Laporan	170.000.000, 00	APBD		10 Laporan	20.120.000, 00
2.18.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	162.499.000, 00	APBD		12 Bulan	140.973.990 ,00
2.18.01. 2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	130 Laporan	1.323.000,00	APBD		130 Laporan	1.336.230,0 0
2.18.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	12 Laporan	48.207.900,0 0	APBD		12 Laporan	48.689.979, 00
2.18.01. 2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	5 Laporan	9.201.100,00	APBD		5 Laporan	1.293.111,0 0
2.18.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	12 Laporan	103.767.000, 00	APBD		12 Laporan	89.654.670, 00

2.18.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	47.698.000,0 0	APBD		100%	48.174.980,0 00
2.18.01. 2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	13 Unit	47.698.000,0 0	APBD		13 Unit	48.174.980,0 00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti		100%	57.000.000,0 0	APBD		100%	5.050.000,0 0
2.18.02. 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan		2 Dokumen	54.000.000,0 0	APBD		1 Dokumen	3.030.000,0 0
2.18.02. 2.01.000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	1 Dokumen	51.500.000,0 0	APBD		1 Dokumen	1.515.000,0 0

2.18.02. 2.01.000 4	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	1 Dokumen	2.500.000,00	APBD		1 Dokumen	1.515.000,00
2.18.02. 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah		12 Dokumen	3.000.000,00	APBD		12 Dokumen	2.020.000,00
2.18.02. 2.02.000 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	12 Dokumen	3.000.000,00	APBD		12 Dokumen	2.020.000,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan		100%	17.000.000,00	APBD		100%	15.150.000,00
2.18.03. 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		2 Kegiatan	17.000.000,00	APBD		2 Kegiatan	15.150.000,00

2.18.03. 2.01.000 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	1 Dokumen	17.000.000,0 0	APBD		1 Dokumen	15.150.000, 00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP		80%	202.500.000, 00	APBD		85%	166.650.000 ,00
2.18.04. 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP		5.100 Izin	202.500.000, 00	APBD		5.200 Izin	166.650.000 ,00
2.18.04. 2.01.000 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	5.100,00 Pelaku Usaha	193.500.000, 00	APBD		5.200 Pelaku Usaha	161.600.000 ,00

2.18.04. 2.01.000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	18,00 Pelaku Usaha	5.000.000,00	APBD		15 Pelaku Usaha	2.020.000,00
2.18.04. 2.01.000 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	250 Kegiatan Usaha	4.000.000,00	APBD		260 Kegiatan Usaha	3.030.000,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal		95%	417.400.000,00	APBD		95%	421.574.000,00

2.18.05. 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal		250 Pelaku Usaha	417.400.000,00	APBD		255 Pelaku Usaha	421.574.000,00
2.18.05. 2.01.000 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	250,00 Pelaku Usaha	318.565.000,00	APBD		255 Pelaku Usaha	321.750.650,00
2.18.05. 2.01.000 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	KAB. SIDEN RENG RAPP ANG	30,00 Kegiatan Usaha	98.835.000,00	APBD		35 Kegiatan Usaha	99.823.350,00

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses		100%	5.000.000,00	APBD		100%	3.030.000,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		4 Dokumen	5.000.000,00	APBD		4 Dokumen	3.030.000,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	KAB. SIDENRENG RAPPANG	4 Dokumen	5.000.000,00	APBD		4 Dokumen	3.030.000,00
					2.810.493.205,00				2.557.313.137,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan di tahun berikutnya, sehingga akan menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan mengingat Renja ini akan menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA tahun 2024.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sehingga visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidenreng Rappang



Drs. H. LABENGNGA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19741231 199003 1 126